

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA BAHARI III KABUPATEN BUTON SELATAN

Andy Arya Maulana Wijaya¹⁾, Herman Lawelai¹⁾, Anwar Sadat¹⁾, Nastia¹⁾, L.M. Azhar Sa'ban¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia

Corresponding author : Herman Lawelai
E-mail : hermanlawelai@yahoo.com

Diterima 20 Januari 2022, Direvisi 07 Maret 2022, Diterima 07 Maret 2022

ABSTRAK

Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan pemberdayaan dan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan. Desa Bahari III menjadi salah satu ikon pariwisata pesisir bagi Kabupaten Buton Selatan, dengan ciri kawasan pesisir, masyarakat yang memegang teguh adat istiadat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang turut mendukung hal itu. Namun, pengembangan pariwisata yang kini dilakukan belum menempatkan masyarakat sebagai subjek kebijakan pengembangan pariwisatanya. Pendekatan yang menempatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam pengembangan pariwisata, yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah membentuk dasar untuk mendefinisikan model pariwisata berbasis masyarakat yang terdapat di Desa Bahari III. Dengan begitu, pengabdian masyarakat ini digunakan untuk mendeskripsikan kondisi ekonomi desa, partisipasi masyarakat yang memungkinkan adanya kolaborasi dan penciptaan modal sosial. Melalui pengabdian ini dapat menunjukkan bagaimana model ini dapat digunakan untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat terkait pariwisata, dan menyarankan tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Kata kunci: pengembangan; kapasitas; pariwisata; bahari III.

ABSTRACT

The purpose of this community service is to strengthen community capacity in community participation-based tourism development which is closely related to empowerment and sustainable tourism development. Desa Bahari III has become one of the icons of coastal tourism for South Buton Regency, with the characteristics of a coastal area, people who adhere to customs and the socio-economic conditions of the people who support it. However, the tourism development that is currently being carried out has not placed the community as the subject of its tourism development policy. An approach that places community group participation in tourism development, which is carried out with the aim of improving people's living standards. The purpose of this community service is to form the basis for defining the community-based tourism model found in Bahari III Village. That way, this community service is used to describe the economic condition of the village, community participation that allows collaboration and the creation of social capital. Through this service, we can show how this model can be used to assess the level of community participation in tourism, and suggest further actions that are needed.

Keywords: development; capacity; tourist; bahari III.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018, Pemerintah mengucurkan Rp. 409.995.008.109 (Empat ratus Sembilan miliar Sembilan atus Sembilan puluh lima juta delapan ribu seratus Sembilan rupiah) sebagai anggaran dana untuk membiayai Pengetahuan Inovasi Desa. Kepastian mengenai jumlah dana ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48

Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.

Desa memiliki banyak SDA yang belum dikembangkan secara optimal (Afrianti et al., 2020; Arsik, Selfianti Faisal; Lawelai, 2020). Kekurangan sumberdaya pembangunan berdampak pada tingkat produktifitas rendah dan berimplikasi terhadap tingkat pendapatan yang rendah (Lawelai, 2021). Inovasi merupakan salah satu kunci penting bagi masyarakat desa untuk menghadapi

perubahan tersebut. Selain itu, inovasi hadir dari adanya kolaborasi berbasis komunitas. Begitupun bagi Desa Bahari III Kabupaten Buton Selatan, yang kini terkenal dengan kawasan wisata pantainya yang indah dan unik.

Dengan kondisi topografi yang sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan laut, menjadikan potensi daerah perikanan, pertanian dan wisata laut menjadi komoditi yang patut untuk dikembangkan. Untuk itu diperlukan adanya sentuhan inovasi dalam usaha pengembangan potensi tersebut. Pemanfaatan komunitas dalam rangka pengembangan pariwisata menjadi arus utama bagi kebijakan pariwisata daerah (PM, 2010). Melalui desa hal itu, dapat mendorong pemangku kepentingan di desa untuk membangun budaya inovasi dalam mengelola sumberdaya untuk kesejahteraan. Desa tidak lagi bersandar pada eksploitasi SDA, tapi mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya berbasis pengetahuan (knowledge) (Wulan, 2007).

Prospek desa inovasi juga di dukung melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan sejumlah kewenangan pada desa berupa kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa. UU Desa juga memberikan dukungan finansial desa melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Bermodal kewenangan dan anggaran, kita berharap desa mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara efektif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam observasi lapangan, peluang tersebut belum dapat dioptimalkan oleh masyarakat desa. Aktifnya kelompok masyarakat namun belum ditunjang dengan adanya kolaborasi antar sektor, membuat sisi ini masih begitu lemah dalam memberikan kontribusi bagi pariwisata. Selain itu, masih kuatnya intervensi pemerintah daerah membuat kelompok masyarakat terkesan masih menjadi objek pasif dalam pembangunan pariwisata di Desa Bahari III. Namun, modal budaya (cultural capital) yang dimiliki oleh desa Bahari III, masih begitu terjaga dengan baik. Relasi antara pemerintah desa dan perangkat adat, mampu melahirkan peraturan desa yang sekaligus juga mengikat secara sosial budaya di masyarakat desa. Seperti misalnya, adanya aturan larangan desa untuk mengkonsumsi maupun menjual minuman keras.



Gambar 1 Kondisi Potensi Desa Bahari III

Dalam memandang kondisi tersebut, bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pariwisata diadvokasi sebagai cara menerapkan pariwisata berkelanjutan (Okazaki, 2008). Seperti halnya, Lane (Sharpley, 2000) yang juga berpendapat bahwa pariwisata berkelanjutan adalah hubungan triangulasi yang seimbang antara daerah tujuan wisata (host areas) dengan habitat dan manusianya, pembuatan paket liburan (wisata), dan industri pariwisata, dimana tidak ada satupun stakeholder dapat merusak keseimbangan.

Untuk itu, diperlukan adanya konsep Community Based Development yang mana lazimnya digunakan oleh para perancang pembangunan pariwisata strategi untuk memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sebagai patner industri pariwisata. Tujuan yang ingin diraih adalah pemberdayaan sosial ekonomi komunitas itu sendiri dan meletakkan nilai lebih dalam berpariwisata, khususnya kepada para wisatawan.

Menurut Russell.P menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan regenerasi ekonomi dan sosial sekaligus melindungi budaya terhadap arus pasang globalisasi yang meningkat (Matilainen et al., 2018). Oleh karena itu pariwisata berbasis masyarakat harus memenuhi kriteria :

1. Mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat lokal
2. Memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat setempat

3. Aktivitas kepariwisataan melindungi budaya dan lingkungan alam

Dengan begitu, diperlukan adanya ketersediaan data yang memadai, menyakinkan, dan *up to date*, mengenai kondisi objektif maupun perkembangan desa-desa sangat diperlukan. Pengelolaan data desa, baik tingkat desa dan kecamatan. Akan tetapi ini bukan hal yang mudah karena luas wilayah, partisipasi masyarakat dan pengetahuan aparatur desa. Melalui pengabdian masyarakat ini, diharapkan adanya kolaborasi antar komunitas berbasis potensi masing-masing dapat dilakukan untuk menciptakan model pendekatan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Bahari III Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.



Gambar 2 Kawasan Wisata Desa Bahari III

Upaya alternatif untuk keluar dari kerumitan permasalahan yang dihadapi desa di kecamatan lasalimu selatan adalah membangun tradisi berbagi gagasan, pengalaman, dan kerjasama antardesa. Untuk itu pemetaan potensi desa diperlukan untuk mendokumentasikan praktik inovasi yang ada di desa-desa, sekaligus mendiseminasikan dan menyebarkan informasi itu ke publik yang lebih luas.

Dalam sejumlah observasi yang dilakukan di desa Bahari III Kecamatan Sampolawa, maka perumusan masalah yang ditemukan diantaranya yaitu belum optimalnya pengetahuan tentang kelembagaan masyarakat yang dapat menjadi sarana penggerak inovasi pariwisata di desa, belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat perihal konsep pariwisata berbasis masyarakat dan penerapannya dalam pengembangan pariwisata di desa, belum optimalnya kinerja lembaga masyarakat desa dalam berkolaborasi untuk membangun inovasi pariwisata desa, serta dukungan sarana dan prasarana desa belum optimal di gunakan oleh sebab pengetahuan masyarakat masih minim.

Dengan begitu, maka pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui serangkaian *workshop* yang mengacu pada pendekatan pariwisata berbasis masyarakat, sebagai usaha

bersama masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata yang terdapat di desa bahari III. Disisi lain, konsep ini dijadikan sebagai rangkaian tahapan program yang akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk dapat berkolaborasi dalam memaksimalkan manfaat potensi pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat secara umum.

METODE

Metode Kegiatan pengabdian di lakukan melalui rangkain kegiatan yang pangkalnya berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat. Namun pelaksanaannya dilakukan melalui rangkaian, yaitu:

1. Survey oleh kelompok mahasiswa dengan maksud memperoleh informasi tentang kegiatan ekonomi masyarakat setempat, untuk disesuaikan dengan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat yang bisa dilakukan.
2. FGD internal, yang dilakukan bersama tim survey untuk mengungkap hal-hal yang menarik untuk dikembangkan.
3. *Workshop* dan FGD, yang dilakukan bersama kelompok masyarakat, kelompok pemuda dan representasi pemerintah desa.

Pengabdian di lakukan oleh Dosen dan Mahasiswa FISIP UM Buton bersama aparat Desa Bahari III, untuk memberikan penguatan kapasitas Kelompok Pemuda dan Kelompok Perempuan sebanyak 26 orang dengan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata lokal desa. Data Primer dalam pengabdian masyarakat ini diperoleh melalui hasil-hasil FGD dan *Workshop*, sedangkan data sekunder melalui data hasil survei dan wawancara yang diperkuat dengan literature relevan. Teknik pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaborasi aktif antara Pemerintah sebagai penentu dan pengambil kebijakan, serta Dosen dan Mahasiswa sebagai bentuk kajian akademis, serta masyarakat sebagai subjek penguatan kapasitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap I: Profil Desa Bahari III Kabupaten Buton Selatan

Desa Bahari III merupakan salah satu desa yang berada pada wilayah kecamatan Sampolawa Buton Selatan, daerah ini secara keseluruhan adalah daratan Pulau Buton dengan luas sekitar 153,57 KM² dan jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 24.132 jiwa. Secara administratif Kecamatan Sampolawa terdiri dari 16 desa/ kelurahan.

Dari 12 Desa tersebut, Desa Todombulu adalah yang terluas wilayahnya

yaitu 48,96 KM² (31,94%), menyusul Desa Sandang Pandang dengan luas 20,19 KM² (13,17 %), Desa Gunug Sejuk dengan luas 16,89 KM² (11,02 %), Desa Hendea dengan luas 10,00 KM² (6,52 %), dan Desa Katilombu dengan luas 8,89 KM² (5,80 %), sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah Desa Bahari 2 dan Desa Bahari 3 dengan luas wilayah masing-masing 2,09 M² (1,36 %).

Salah satunya wisata pantai di Kabupaten Buton Selatan (Busel), yakni Pantai Desa Bahari yang terletak di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa. Lokasi wisata ini terdiri dari bongkahan batu krust yang membentuk pulau kecil dan menyerupai Raja Ampat yang ada di Papua. Jarak dari Kota Baubau menuju lokasi wisata ini sekitar 51,2 km dengan jarak tempuh 1 hingga 2 jam. Ada dua pilihan jalur alternatif untuk sampai ke Pantai Bahari, yakni melewati perbatasan Busel dengan Baubau atau melewati poros Baubau- Pasarwajo, Buton.

Salah satunya wisata pantai di Kabupaten Buton Selatan, yakni Pantai Desa Bahari yang terletak di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa. Lokasi wisata ini terdiri dari bongkahan batu krust yang membentuk pulau kecil dan menyerupai Raja Ampat yang ada di Papua.

Selain itu, desa bahari III memiliki karakteristik pekerjaan masyarakat yang cukup dominan yakni sebagai Nelayan tangkap. Menurut data yang dihimpun, pekerjaan sebagai nelayan adalah proporsi terbesar pekerjaan masyarakat desa yang mencapai 63,5 %. Untuk jenis pekerjaan lainnya yang cukup dominan adalah pedagang kaki lima, pembuat kapal dan buruh.

Program pengandian masyarakat ini dilaksanakan mulai tanggal 20 – 23 November 2020 di Desa Bahari III Kabupaten Buton Selatan. Berdasarkan hasil observasi awal dengan beberapa wawancara pada warga yang dilakukan pada rangkaian kegiatan pengabdian ini, diperoleh data bahwa potensi yang dimiliki oleh Desa Bahari III sehingga dapat digunakan sebagai materi dasar dalam menentukan strategi PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Observasi Jenis Potensi Desa Bahari III

No.	Jenis Potensi	Deskripsi Umum
1.	Potensi Geografis	Desa Bahari III, memiliki pantai dengan pasir putih disepanjang garis pantainya. Salah satu sudut pesisirnya dikenal

		dengan objek wisata populer di Buton Selatan yang disebut Ratu Empat Busel. Objek wisata ini juga dipromosikan sebagai salah satu destinasi unggulan Buton Selatan.
2.	Potensi Sosial Budaya	Desa Bahari III, memiliki baruga adat dan masih digunakan oleh masyarakat menggelar sejumlah ritual adat dan acara-acara adat tertentu secara periodik.
3.	Potensi Sosial Ekonomi	Aktivitas masyarakat dicirikan sebagai nelayan. Namun disisi lain, Desa Bahari III juga dikenal dengan usaha pembuatan kapal nelayan. Objek wisata unggulan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Sumber: Hasil Observasi Lapangan

Berdasarkan deskripsi diatas, bahwa Desa sejatinya memiliki sejumlah potensi yang memungkinkannya untuk mengembangkan sarana ekonomi desa yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya secara umum. Dengan melalui pemanfaatan potensi dan model pemberdayaan masyarakat yang saling dukung, untuk itu pendekatan pariwisata berbasis masyarakat dirasa paling relevan untuk hal ini.

Hanya saja, hal ini perlu memperhatikan juga kapasitas masyarakat tentang skema komunitas tersebut. Dengan merujuk pada fenomena yang terjadi di desa Bahari III, sebuah program memungkinkan untuk diterima dan mampu diadopsi oleh masyarakat jika pengetahuan tentang hal itu cukup memberikan input positif bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, Menurut Hudson dan Timothy dalam (Rizkiyanto, N, 2018) pariwisata berbasis masyarakat merupakan pelibatan masyarakat dengan kepastian manfaat.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata terdiri dari atas dua

maksud yakni mekanisme pengambilan keputusan yang berasal dari masyarakat, dan partisipasi aktif bersama dalam menerima keuntungan dari pengelolaan desa wisata. Berkenaan dengan hal ini pada dasarnya terdapat 3 prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat atau *community based tourism* menurut Sunaryo (2013), yaitu:

- a. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- b. Terdapat kepastian masyarakat lokal menerima manfaat
- c. Pemberian edukasi tentang pariwisata kepada masyarakat lokal (Rizkianto, N, 2018)

Tahap II : Pelaksanaan Kegiatan FDG Internal Tim

Pariwisata Berbasis Masyarakat merupakan konsep yang menuntut keterlibatan masyarakat bukan hanya sekedar berpartisipasi, namun juga pada adanya kompetensi yang relevan untuk menjalankan hal itu. Dengan begitu, tahapan selanjutnya dari program pengabdian masyarakat ini adalah menyusun rencana kerja selanjutnya melalui fokus grup diskusi pada rangkaian hasil survey dan observasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Untuk itu pada program pengabdian masyarakat ini menggunakan prinsip dasar pariwisata berbasis masyarakat menurut UNEP dan WTO (2005), meliputi prinsip ekonomi, prinsip sosial, prinsip budaya, prinsip politik dan prinsip lingkungan (Syarifuddin, 2018)

Dalam FGD yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang menjadi ciri khusus aktivitas sosial masyarakat Desa Bahari III yang dapat digunakan sebagai bentuk capaian dalam penerapan pariwisata berbasis masyarakat. Pertama: Komunitas masyarakat Desa Bahari III, yang memiliki basis kelompok masing-masing yakni komunitas berbasis pemuda dan komunitas berbasis unit usaha masyarakat. Menurut hasil observasi, bahwa komunitas masyarakat yang ada di Desa Bahari III berjumlah 10 Komunitas yang semuanya terdata sebagai bagian inventarisasi pemerintah desa. Sejumlah komunitas ini kemudian yang menjadi sasaran kegiatan dalam tahap selanjutnya yakni workshop pariwisata berbasis masyarakat.

Kedua, budaya masyarakat Desa Bahari III yang secara internal masih dicirikan oleh semangat gotong royong dan karakteristik masyarakat pesisir bahari. Hanya saja, budaya ini belum bisa maksimal untuk mendukung pendekatan pariwisata berbasis masyarakat,

yang mengharuskan bukan saja partisipasi masyarakat namun juga pada kemampuan masyarakat untuk menerima pengunjung tempat wisata, yang sudah pasti memiliki budaya yang berbeda. Tuntutan terhadap adaptasi dan penerimaan budaya lain dalam proses promosi pariwisata perlu dilakukan pada komunitas masyarakat, namun tetap pada memegang penuh pada budaya lokal yang ada dimasyarakat. Disisi lain, pada aspek ini diperlukan komunikasi budaya yang perlu menjembatani kesiapan masyarakat untuk dapat menjamu dan menerima masyarakat dari luar, dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan dan peningkatan pariwisata desa.

Ketiga, kesiapan infrastruktur yang dapat mendukung bidang pariwisata desa. Pada sisi ini, hasil observasi lapangan mengenai aspek ini dirasa belum begitu maksimal tersedia. Dalam penyiapan desa sebagai daerah wisata, sudah tentu perlu persiapan infrastruktur yang mampu dimanfaatkan oleh pengunjung atau wisatawan. Infrastruktur yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan kebutuhan wisatawan/pengunjung dan juga kebutuhan aksesibilitas pariwisata. Adapun beberapa infrastruktur tersebut adalah akses jalan yang belum memiliki petunjuk jalan, gerbang lokasi wisata yang belum optimal, sarana kebersihan, WC Umum, Warung atau Toko makanan dan aksesoris, penginapan serta aktivitas lainnya yang dapat menunjang kesiapan pariwisata.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi internal tersebut diatas maka diperoleh sejumlah data, yang akan dijadikan rujukan bagi tim dalam melakukan workshop dengan mengedepankan adanya partisipasi masyarakat dan konsep pariwisata berbasis masyarakat yang relevan dengan kondisi yang terjadi di desa.

Tahap III: Workshop bersama Kelompok Masyarakat

Pada tahap ini, Workshop dimulai dengan pemberian materi perihal pariwisata berbasis masyarakat hal ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman bersama terkait konsep tersebut dan seperti apa tindakan bersama yang bisa dilakukan sebagai wujud implementasi konsep pariwisata berbasis masyarakat pada masyarakat desa.



Gambar 3 Dokumentasi Workshop bersama Kelompok Masyarakat

Pengenalan pertama, adalah memberikan penjelasan definisi umum pariwisata berbasis masyarakat serta peranannya dalam tata kelola pariwisata. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam deskripsi tersebut, yakni prinsip pariwisata berbasis masyarakat yang perlu dipahami bersama. Pertama, sebagai prinsip ekonomi pariwisata berbasis masyarakat menjadi sebab timbulnya pendapatan masyarakat dan terciptanya lapangan pekerjaan. Maksud dari ini adalah adanya unit usaha yang bisa dikerjakan bersama oleh masyarakat sebagai penunjang objek wisata atau sebagai pemanfaatan secara ekonomi oleh masyarakat sebagai dampak adanya aktivitas pariwisata. Contoh misalnya adalah warung, kedai, penginapan atau infrastruktur wisata yang bisa disediakan baik dalam bentuk kelompok maupun investasi BUMDES dan dikelola bersama masyarakat.

Kedua, dalam prinsip sosial konsep pariwisata berbasis masyarakat ini adalah penguatan aspek komunitas masyarakat dengan membentuk kelompok masyarakat dan memperkuat tata kelolanya. Strategi ini bisa dilakukan dengan pengelompokan masyarakat berbasis usia, jenis usaha maupun kelompok aktivitas tertentu. Penguatan kelompok ini dimungkinkan untuk dilakukan karena sesuai data yang diperoleh sebelumnya bahwa masyarakat desa bahari III memiliki kelompok masyarakat berdasarkan kategori diatas. Dengan begitu peran pemerintah desa diperlukan dalam usaha untuk memberikan ruang kontribusi bagi kelompok masyarakat dalam kebijakan desa dan partisipasi aktif dalam pengelolaan objek wisata desa.

Ketiga, prinsip budaya pada konsep ini mengacu pada pemahaman masyarakat tentang tata nilai, norma, dan pola interaksi dalam aktivitas sosialnya. Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa budaya masyarakat desa Bahari yang masih memegang erat budaya lokalnya, dan ditunjukkan dengan aktivitas budaya yang masih terpelihara. Namun belum begitu optimal dalam penerimaannya terhadap budaya lain,

dalam hal ini interaksi dengan pengunjung wisata. Budaya masyarakat setempat sejatinya bisa menjadi nilai keramahan masyarakat desa terhadap wisatawan yang berkunjung di destinasi wisata yang dimiliki desa bahari III yakni pantainya.

Keempat, prinsip politik pada konsep pariwisata berbasis masyarakat menjadi point utama dalam pendekatan ini. Prinsip ini memungkinkan adanya ruang partisipasi bagi masyarakat desa secara aktif. Partisipasi dibutuhkan dalam pengembangan konsep ini untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat desa terhadap proses dan aktivitas pariwisata di desa bahari III. Pada prinsip ini yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas kelompok masyarakat untuk dapat berpartisipasi, penguatan ini dapat berhasil dilakukan apabila ada dukungan dari pemerintah desa.

Untuk itu, dalam pengabdian masyarakat ini juga selain memperkenalkan potensi yang dimiliki desa, jugs memperkenalkan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat yang dapat dilakukan, namun proses pengabdian masyarakat ini juga memberikan konsep kolaboratif yang dapat dilaksanakan bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah, serta pihak swasta jika hal itu memungkinkan dilakukan di desa dengan konsep swakelola. Selain itu, penguatan pada sisi modal sosial diperlukan sebagai sarana kohesivitas sosial yang mampu mengangkat kapasitas masyarakat (Wijaya, 2016)

Dalam pengabdian masyarakat ini juga memberikan konsep kolaborasi antara stakeholder yang ada didesa, beserta potensi peran masing-masing yang bisa ditindaklanjuti menjadi program bersama. Disisi lain, ditemukan pula beberapa hal yang bisa menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat ini, diantaranya adalah kesadaran masyarakat yang masih butuh waktu untuk berproses, kesiapan infrastuktur penunjang, dan sarana promosi yang perlu terus dikembangkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk memberikan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dalam pelaksanaan konsep Community Based Tourism. Dalam observasi yang dilakukan ditemukan beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan serta dapat dijadikan input dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat yang bisa dilakukan di Desa Bahari III, yakni potensi geografis, potensi sosial budaya dan potensi sosial ekonomi. Dari potensi ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai wujud implementasi

pariwisata berbasis masyarakat melalui beberapa prinsip yakni ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal ini dapat maksimal dengan dukungan dari komunitas masyarakat yang sudah ada di Desa Bahari III, namun masih perlu adanya penguatan kapasitas lanjutan. Karena ditemukan pula beberapa tantangan dalam implementasinya yakni waktu, infrastruktur dan promosi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Bahari III Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton yang telah bersedia menjadi subjek sekaligus objek binaan dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Begitu pun ucapan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Buton yang membiayai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrianti, W., Rostina, R., Ilham, L. O. M., Ningsih, E. S., Putra, M. R. A., & Lawelai, H. (2020). DESA WISATA MENJADI KEKUATAN BARU EKONOMI DESA. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*. <https://doi.org/10.36841/integritas.v4i2.576>
- Arsik, Selfianti Faisal; Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7. <http://www.tjybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Lawelai, H. (2021). Analysis of Local Government Strategies in Capacity Building for Regional Financial, Asset, and Revenue Management Bodies in Baubau City, Indonesia. *International Journal Of Science, Technology & Management*, VOL. 2 NO., 61–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i1.137>
- Matilainen, A., Suutari, T., Lähdesmäki, M., & Koski, P. (2018). Management by boundaries – Insights into the role of boundary objects in a community-based tourism development project. *Tourism Management*. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.02.003>
- Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. In *Journal of Sustainable Tourism*. <https://doi.org/10.2167/jost782.0>
- PM. (2010). PM.26/UM.001/MKP/2010.

PEDOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA MELALUI DESA WISATA DENGAN.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Rizkiyanto, N, T. T. (2018). PENERAPAN KONSEP COMMUNITY BASED TOURISM DALAM PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA BERKELANJUTAN (Studi Pada Desa Wisata Bangun. *Administrasibisnis.Studentjournal.Ub ...*, 58(2), 20–26.
- Sharpley, R. (2000). Tourism and sustainable development: Exploring the theoretical divide. *Journal of Sustainable Tourism*. <https://doi.org/10.1080/09669580008667346>
- Syarifuddin. (2018). The Implementation of Community Based Tourism Concept In the Management of Natural Tourism in Kampoeng Karts Rammang-Rammang Maros Regency. *UNM Geographic Journal*, 2(1), 74–83.
- Wijaya, A. A. M. (2016). Modal Sosial Untuk Kapasitas Community Governance (Studi Kasus Perempuan Pesisir Kelurahan Sulaa Kota Baubau). *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 107. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.436>
- Wulan, T. R. (2007). Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis. *Jurnal.lpb.Ac.Id*, 01(01), 105–130.